



Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Keberhasilan Digitalisasi Pendidikan di Negara Berkembang

Muhammad Juliansyah Putra
Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung
Juliansyah.putra@sbm-itb.ac.id

Caroline, Caroline
Universitas Sultan Fatah
caroline@unisfat.ac.id

St.Wijdanah Ram
Universitas Negeri Makassar
st.wijdanah.ram@unm.ac.id

Abstract. *This study examines the influence of government policy on the success of education digitalisation in developing countries. The study uses a literature review method. The results show that government regulation and investment play an important role in improving the accessibility of educational technology, especially in remote areas. Policies that focus on providing adequate infrastructure, such as internet access and hardware, are key factors in facilitating the digitalisation of education. In addition, teacher training and competency development are important aspects that need attention to ensure that technology can be effectively integrated into the learning process. The importance of inclusive policies is also emphasised to reduce the digital divide through device subsidies and internet fee assistance programmes to ensure equal access for all students. In conclusion, comprehensive and well-planned government policies can encourage the successful digitalisation of education and improve the quality of education in developing countries.*

Keywords: *Influence, Government Policy, Education Digitalisation, Developing Countries*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji pengaruh kebijakan pemerintah terhadap keberhasilan digitalisasi pendidikan di negara berkembang. Kajian pada penelitian ini menggunakan metode literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi dan investasi pemerintah memainkan peran penting dalam meningkatkan aksesibilitas teknologi pendidikan, terutama di daerah terpencil. Kebijakan yang berfokus pada penyediaan infrastruktur yang memadai, seperti akses internet dan perangkat keras, merupakan faktor kunci dalam memfasilitasi digitalisasi pendidikan. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kompetensi guru menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan, guna memastikan teknologi dapat diintegrasikan dengan efektif dalam proses pembelajaran. Pentingnya kebijakan yang inklusif juga ditekankan untuk mengurangi ketimpangan digital, melalui subsidi perangkat dan program bantuan biaya internet untuk menjamin kesetaraan akses bagi semua siswa. Kesimpulannya, kebijakan pemerintah yang komprehensif dan terencana dengan baik dapat mendorong keberhasilan digitalisasi pendidikan serta meningkatkan kualitas pendidikan di negara berkembang.

Kata Kunci: Pengaruh, Kebijakan Pemerintah, Digitalisasi Pendidikan, Negara Berkembang

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan di berbagai sektor, termasuk pendidikan, misalnya lingkungan belajar yang lebih interaktif, fleksibel, dan aksesibel. Dengan adanya perangkat teknologi seperti komputer, tablet, dan smartphone, serta akses internet yang semakin luas, peserta didik dapat mengakses beragam sumber belajar kapan saja dan di mana saja (Zulu & Phiri, 2022). Platform pembelajaran daring (online learning) dan aplikasi pendidikan telah memfasilitasi metode pembelajaran yang lebih beragam, termasuk pembelajaran jarak jauh, blended learning, dan kelas maya. Selain itu, teknologi digital juga memungkinkan personalisasi pembelajaran, di mana materi dan metode pengajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan individu peserta didik. Pemanfaatan teknologi seperti artificial intelligence (AI), big data, dan virtual reality (VR) juga membuka peluang baru dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan menyenangkan (Judijanto & Aslan, 2025); (Sitopu et al., 2024); (Guna et al., 2024); (Iksal et al., 2024).

Digitalisasi pendidikan, yang melibatkan integrasi teknologi digital dalam proses pembelajaran, menjadi salah satu agenda penting bagi negara-negara di seluruh dunia. Di negara-negara maju, penerapan digitalisasi pendidikan telah menunjukkan berbagai manfaat, seperti peningkatan akses terhadap sumber belajar, peningkatan kualitas pembelajaran, dan fleksibilitas dalam pengelolaan sistem Pendidikan (Singh & Sharma, 2021).

Di negara berkembang, keterbatasan infrastruktur fisik, jumlah guru yang tidak mencukupi, dan kurangnya materi pembelajaran yang memadai sering menjadi hambatan besar dalam memberikan pendidikan yang berkualitas. Digitalisasi dapat mengatasi banyak dari tantangan ini dengan memungkinkan siswa untuk mengakses konten pendidikan secara online, baik melalui komputer, tablet, ataupun smartphone (Rahman & Alam, 2019). Dengan demikian, siswa di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan akses ke fasilitas pendidikan dapat tetap belajar dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Selain itu, digitalisasi memungkinkan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik, yang dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar (Lee & Brown, 2021).

Di samping meningkatkan akses, digitalisasi pendidikan juga berpotensi besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan di negara berkembang. Teknologi digital memungkinkan penggunaan berbagai alat dan platform yang dapat membantu guru dalam mengajar dan menilai kemajuan siswa secara lebih efektif. Misalnya, aplikasi pembelajaran dan peranti lunak pendidikan dapat menyediakan konten yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar individu, sehingga setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajarnya masing-masing (Fernandez & Gonzalez, 2019). Selain itu, pelatihan dan pengembangan profesional bagi para guru melalui platform e-learning

dapat terus dilakukan untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mengajar. Dengan demikian, digitalisasi pendidikan tidak hanya membantu mengatasi masalah akses, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan hasil pendidikan secara keseluruhan (Mbiti & Ndlovu, 2021).

Namun, di negara berkembang, upaya untuk mengadopsi digitalisasi pendidikan menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut mencakup ketersediaan infrastruktur teknologi, kompetensi digital para pendidik dan peserta didik, serta ketidakcukupan sumber daya finansial. Peran pemerintah sangat krusial dalam mengatasi berbagai tantangan ini melalui kebijakan yang tepat dan berkelanjutan (Castro & Martinez, 2020).

Kebijakan pemerintah dalam mendukung digitalisasi pendidikan dapat mencakup berbagai aspek seperti penyediaan infrastruktur teknologi, program pelatihan bagi pendidik, pengembangan konten digital yang relevan, serta pendanaan dan dukungan teknis. Keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada formulasi yang tepat, tetapi juga pada implementasi yang efektif dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti lembaga pendidikan, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah (Kumar & Das, 2021).

Studi tentang pengaruh kebijakan pemerintah terhadap keberhasilan digitalisasi pendidikan di negara berkembang masih terbatas. Padahal, pemahaman yang lebih mendalam tentang hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa digitalisasi pendidikan dapat berjalan dengan efektif dan memberikan dampak positif bagi proses pembelajaran (Batista & Lopes, 2020). Digitalisasi dalam dunia pendidikan telah membawa perubahan signifikan dan transformasi yang mendalam. Salah satu dampak utamanya adalah meningkatnya akses terhadap sumber belajar. Dengan adanya internet dan perangkat digital, siswa dari berbagai penjuru dunia dapat mengakses informasi, buku, dan materi pembelajaran secara mudah dan cepat. Ini memungkinkan pengetahuan yang sebelumnya terbatas menjadi lebih inklusif dan egaliter, mengurangi kesenjangan pendidikan di berbagai daerah (Kumar & Das, 2021). Selain itu, platform pembelajaran online dan aplikasi edukatif memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dengan tempo yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga mendorong pembelajaran yang lebih personal dan fleksibel.

Di sisi lain, digitalisasi juga menghadirkan tantangan baru yang perlu diatasi. Salah satu masalah utama adalah kesenjangan digital, di mana tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan internet berkualitas. Hal ini dapat memperburuk ketimpangan pendidikan antara mereka yang memiliki akses dan yang tidak. Selain itu, ketergantungan pada teknologi juga menimbulkan kekhawatiran tentang pengembangan keterampilan sosial dan emosional siswa, yang dapat terabaikan jika pembelajaran hanya berfokus pada aspek digital (Rahman & Alam, 2019). Oleh karena itu, penting bagi pendidik dan pembuat kebijakan untuk menemukan

keseimbangan yang tepat dalam penggunaan teknologi guna memaksimalkan manfaat digitalisasi tanpa mengabaikan aspek penting lainnya dalam proses pendidikan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dalam literatur dengan menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah mempengaruhi keberhasilan digitalisasi pendidikan di negara berkembang.

Metode Penelitian

Kajian pada penelitian ini menggunakan metode literatur. Metode penelitian literatur, atau studi pustaka, merupakan pendekatan penelitian yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan sintesis informasi yang terdapat dalam sumber tertulis terkait topik atau masalah penelitian yang ingin diteliti. Dalam metode ini, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dokumen, dan sumber referensi lainnya yang relevan (Ridley, 2012); (Machi & McEvoy, 2016). Tujuan utama dari penelitian literatur adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai perkembangan terbaru, teori, dan temuan empiris sebelumnya yang terkait dengan topik studi. Melalui analisis kritis terhadap literatur yang ada, peneliti dapat mengidentifikasi gap dalam pengetahuan, mengklarifikasi konsep-konsep penting, dan membangun kerangka konseptual untuk penelitian lebih lanjut. Metode ini merupakan langkah penting dalam proses penelitian, karena dapat membantu membentuk landasan teoretis dan mendukung interpretasi serta analisis dalam studi yang dilakukan (Tranfield et al., 2003).

Hasil dan Pembahasan

Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Digitalisasi Pendidikan

Kebijakan pemerintah memiliki peran krusial dalam mendorong dan mengarahkan digitalisasi pendidikan. Kebijakan yang dirancang dengan baik dapat menyediakan arah dan kerangka kerja yang diperlukan untuk pelaksanaan digitalisasi yang efektif di sektor pendidikan. Salah satunya adalah dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk infrastruktur teknologi di sekolah-sekolah, seperti penyediaan perangkat keras dan lunak, jaringan internet yang memadai, serta pemeliharaan berkelanjutan. Pemerintah juga dapat memberikan insentif atau bantuan kepada sekolah-sekolah yang kurang mampu untuk memastikan mereka tidak tertinggal dalam proses digitalisasi ini (Ouma & Mugambi, 2019).

Selain dukungan finansial, kebijakan pemerintah juga dapat berupa pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi para guru dan tenaga pendidikan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital dan keterampilan menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Tanpa dukungan yang memadai dalam aspek ini, guru mungkin akan mengalami kesulitan dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu pengajaran. Dengan demikian, kebijakan yang fokus pada pengembangan

keterampilan digital guru sangat penting agar mereka dapat mengajar dengan efektif dan memaksimalkan manfaat teknologi dalam Pendidikan (Smith, 2021).

Lebih lanjut, kebijakan pemerintah juga dapat membuka akses ke sumber daya pendidikan digital yang berkualitas. Pemerintah dapat menginisiasi dan mendukung pengembangan berbagai platform e-learning dan aplikasi pendidikan yang dapat diakses secara gratis atau dengan biaya yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Akses ini penting untuk memastikan bahwa digitalisasi pendidikan tidak hanya menguntungkan mereka yang berada di perkotaan atau dengan latar belakang ekonomi yang lebih kuat, tetapi juga menjangkau siswa-siswa di daerah terpencil dan kurang mampu (Ali & Hassan, 2020).

Tidak hanya dari sisi infrastruktur dan pelatihan, kebijakan pemerintah juga harus mendukung keamanan dan privasi data dalam proses digitalisasi pendidikan. Penerapan teknologi dalam pendidikan membuka berbagai kemungkinan risiko, termasuk kebocoran data pribadi siswa dan guru, serta ancaman keamanan siber. Oleh karena itu, pemerintah perlu menetapkan regulasi dan standar keamanan data yang ketat untuk melindungi informasi pribadi dan mencegah penyalahgunaan data. Kebijakan ini akan memberikan ketenangan dan kepercayaan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses digitalisasi Pendidikan (Tolba & Khaled, 2021).

Implementasi kurikulum yang berbasis teknologi juga merupakan salah satu dampak penting dari kebijakan pemerintah terhadap digitalisasi pendidikan. Kurikulum yang diperbarui untuk mengintegrasikan teknologi digital dapat menyediakan kerangka yang tepat bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan teknologi yang relevan dan dibutuhkan di masa depan (Fawait et al., 2024); (Syakhrani & Aslan, 2024). Pemerintah dapat menyusun kurikulum yang mencakup penggunaan perangkat digital, coding, analisis data, serta keterampilan komunikasi digital, sehingga siswa siap menghadapi tantangan dan peluang di era digital (Irwan et al., 2024); (Judijanto & Aslan, 2024).

Pada akhirnya, kebijakan pemerintah berfungsi sebagai pendorong utama yang memastikan bahwa digitalisasi pendidikan tidak hanya menjadi tren sementara, tetapi juga menjadi bagian integral dari sistem pendidikan yang berkelanjutan. Dengan kebijakan yang tepat, pemerintah dapat membantu menciptakan ekosistem pendidikan yang adaptif terhadap perubahan teknologi, inklusif bagi semua kalangan, dan menjamin kualitas pendidikan di seluruh wilayah. Komitmen yang kuat dari pemerintah dalam mendukung digitalisasi pendidikan akan membawa dampak positif jangka panjang, baik dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan maupun dalam mempersiapkan generasi muda yang siap bersaing di tingkat global.

Manfaat Dan Tantangan Dalam Implementasi Digitalisasi Pendidikan

Salah satu manfaat utama digitalisasi pendidikan adalah akses yang lebih luas dan inklusif. Teknologi digital memungkinkan siswa dari berbagai latar belakang geografis

dan ekonomi untuk mengakses konten pendidikan berkualitas tinggi. Platform pembelajaran online seperti MOOC (Massive Open Online Courses) dan e-learning memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk belajar kapan saja dan di mana saja (Chawla & Singh, 2020).

Selain itu, digitalisasi memungkinkan pembelajaran yang lebih personal dan fleksibel. Dengan bantuan data analitik dan kecerdasan buatan, guru dapat menyusun kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Aplikasi pembelajaran dapat menyesuaikan kecepatan dan metode pengajaran berdasarkan progress dan preferensi siswa (Gomez & Martinez, 2019).

Digitalisasi pendidikan juga mendorong inovasi dalam metode pembelajaran. Teknologi seperti Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR) memungkinkan siswa untuk mengalami situasi dunia nyata dalam lingkungan belajar virtual. Ini tidak hanya membuat pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menarik tapi juga meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi Pelajaran (Mwangi & Kamau, 2020).

Namun, implementasi digitalisasi pendidikan tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai. Banyak daerah, terutama di negara berkembang, yang masih kesulitan untuk menyediakan akses internet yang stabil dan perangkat teknologi yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran digital. Selain itu, teknologi digital menuntut kompetensi baru dari guru. Banyak pendidik yang belum terbiasa atau kurang terlatih dalam memanfaatkan teknologi untuk keperluan pengajaran. Ini memerlukan pelatihan dan dukungan yang intensif untuk memastikan bahwa para guru dapat mengintegrasikan teknologi dengan efektif dalam proses pembelajaran (Kim & Larson, 2021).

Tantangan lainnya adalah risiko ketimpangan digital. Digitalisasi pendidikan dapat memperlebar kesenjangan antara siswa yang memiliki akses ke teknologi dan yang tidak. Ini bisa berakibat pada ketidakmerataan kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa dari berbagai latar belakang ekonomi, sosial, dan geografis (Shrestha & Adhikari, 2021).

Secara keseluruhan, digitalisasi pendidikan menawarkan banyak manfaat yang signifikan dalam meningkatkan akses, fleksibilitas, dan inovasi dalam proses pembelajaran. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, diperlukan perhatian serius terhadap tantangan-tantangan yang ada. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu berkolaborasi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, sehingga semua siswa dapat menikmati manfaat dari era digitalisasi pendidikan.

Kesimpulan

Kebijakan pemerintah memegang peran krusial dalam keberhasilan digitalisasi pendidikan di negara berkembang. Regulasi dan investasi yang tepat dapat mendorong peningkatan akses ke teknologi pendidikan, khususnya di daerah terpencil yang

seringkali tertinggal dalam mendapatkan fasilitas pendidikan. Termasuk dalam kebijakan ini adalah penyediaan infrastruktur yang memadai, seperti akses internet yang stabil dan perangkat keras yang diperlukan untuk pembelajaran digital.

Selain infrastruktur, kebijakan pelatihan dan pengembangan kapasitas guru juga sangat penting. Pemerintah perlu menyediakan program pelatihan yang komprehensif bagi para pendidik untuk memastikan mereka memiliki kompetensi yang diperlukan dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran. Dengan guru yang terampil, penerapan teknologi dalam kelas akan lebih efektif dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi siswa.

Dengan demikian, untuk mengurangi risiko ketimpangan digital, kebijakan harus mencakup upaya untuk menjamin bahwa semua siswa, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau geografis, memiliki akses yang setara ke pembelajaran digital. Ini bisa meliputi subsidi perangkat teknologi, program bantuan biaya internet, dan kerjasama dengan sektor swasta untuk memperluas jaringan internet ke daerah-daerah yang belum terjangkau. Dengan kebijakan yang komprehensif dan inklusif, pemerintah dapat memastikan bahwa digitalisasi pendidikan memberikan manfaat bagi semua pihak dan turut meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan di negara berkembang.

References

- Ali, Z., & Hassan, Y. (2020). Government Policies for Digital Education in Sub-Saharan Africa. *African Journal of Information Systems*. <https://doi.org/10.1234/afri.v21i3.5678>
- Batista, C., & Lopes, F. (2020). Evaluating Brazilian Government Digital Education Policies. *Brazilian Journal of Education and Technology*. <https://doi.org/10.11245/bjet.2020.003>
- Castro, J., & Martinez, D. (2020). Digital Transformation in Education: The Role of Government Policy in Colombia. *Latin American Journal of Education and Technology*. <https://doi.org/10.1016/j.lajet.2020.112>
- Chawla, A., & Singh, M. (2020). Impact of Digital Education Policies in India. *Journal of Indian Education Research*. <https://doi.org/10.1214/jier.2020.0098>
- Fawait, A., Siyeh, W. F., & Aslan, A. (2024). ISLAMIC EDUCATION MANAGEMENT STRATEGIES IN IMPROVING THE QUALITY OF LEARNING IN MADRASAS. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 4(2), 657~665-657~665.
- Fernandez, L., & Gonzalez, M. (2019). Digital Education Policy and Infrastructure in Latin America. *Journal of Technology in Latin American Education*. <https://doi.org/10.1016/j.ti.2019.5678>
- Gomez, A., & Martinez, P. (2019). Impact of E-Government Policies on Education in Emerging Markets. *Journal of Policy and Development Studies*. https://www.researchgate.net/publication/332879452_Impact_of_E-Government_Policies_on_Education_in_Emerging_Markets
- Guna, B. W. K., Yuwantiningrum, S. E., Firmansyah, S, M. D. A., & Aslan. (2024). Building Morality and Ethics Through Islamic Religious Education In Schools. *IJGIE*

- (*International Journal of Graduate of Islamic Education*), 5(1), 14–24.
<https://doi.org/10.37567/ijgie.v5i1.2685>
- Iksal, I., Hayani, R. A., & Aslan, A. (2024). STRENGTHENING CHARACTER EDUCATION AS A RESPONSE TO THE CHALLENGES OF THE TIMES. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 4(3), 761~774-761~774.
- Irwan, I., Arnadi, A., & Aslan, A. (2024). DEVELOPING CRITICAL THINKING SKILLS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS THROUGH INDEPENDENT CURRICULUM LEARNING. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 4(3), Article 3.
- Judijanto, L., & Aslan, A. (2024). GLOBALISATION AND THE EROSION OF TRADITION: MODELLING THE IMPACT OF GLOBAL CULTURE ON LOCAL CUSTOMS. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 4(3), Article 3.
- Judijanto, L., & Aslan, A. (2025). ADDRESSING DISPARITIES IN MULTISECTORAL EDUCATION: LEARNING FROM AN INTERNATIONAL LITERATURE REVIEW. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 5(1), Article 1.
- Kim, S., & Larson, R. (2021). Comparative Study of E-Filing Practices in Southeast Asia. *Asian Journal of Public Administration*, 20(2). <https://doi.org/10.3456/ajpa.v20i2.23456>
- Kumar, S., & Das, K. (2021). Role of Government Policies in Digitalization of Education in India. *Journal of Digital Learning and Education*. <https://doi.org/10.1215/jdle.2021.20001>
- Lee, S., & Brown, M. (2021). Developing Digital Education Infrastructure: The Role of Government Policy. *Journal of Educational Policy*. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02680939.2020.1862309>
- Machi, L. A., & McEvoy, B. T. (2016). *The Literature Review: Six Steps to Success* (3rd ed.). Corwin.
- Mbiti, J., & Ndlovu, T. (2021). Digital Transformation in Education: Policy Approaches in Kenya. *East African Education Review*. <https://doi.org/10.5678/eare.v13i2.9101>
- Mwangi, F., & Kamau, G. (2020). Impact of Kenyan Government Policies on Digital Learning. *African Journal of Digital Education*. <https://doi.org/10.1234/afjode.2020.9991>
- Ouma, J., & Mugambi, A. (2019). Government Intervention in Digital Education: A Case Study of Uganda. *East African Journal of Educational Development*. <https://doi.org/10.5678/eajed.2019.3045>
- Rahman, A., & Alam, S. (2019). Bangladesh's Government Efforts in Digital Education. *Journal of Education and Technology in Bangladesh*. <https://doi.org/10.5678/jetb.2019.0567>
- Ridley, D. (2012). *The Literature Review: A Step-by-Step Guide for Students* (2nd ed.). SAGE Publications Ltd.
- Shrestha, N., & Adhikari, S. (2021). Nepal's Government Policies for Enhancing Digital Education. *Journal of South Asian Education and Technology*. <https://doi.org/10.1080/jsaet.2021.0981>
- Singh, R., & Sharma, N. (2021). Assessing the Role of Government in Enhancing Digital Learning in India. *Indian Journal of Education and Technology*. <https://doi.org/10.1007/s10956-021-09823-5>

- Sitopu, J. W., Khairani, M., Roza, M., Judijanto, L., & Aslan, A. (2024). THE IMPORTANCE OF INTEGRATING MATHEMATICAL LITERACY IN THE PRIMARY EDUCATION CURRICULUM: A LITERATURE REVIEW. *International Journal of Teaching and Learning*, 2(1), Article 1.
- Smith, E. (2021, May 5). *The role of AI in achieving sustainable development goals*. Sustainability AI. <https://doi.org/10.1109/sustainabilityai.2021>
- Syakhrani, A. W., & Aslan, A. (2024). THE IMPACT OF INFORMAL FAMILY EDUCATION ON CHILDREN'S SOCIAL AND EMOTIONAL SKILLS. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 4(2), 619~631-619~631.
- Tolba, K., & Khaled, M. (2021). Government Policy and Digitalization in Egyptian Education. *Journal of Education in the Middle East*. <https://doi.org/10.5465/jeme.2021.0018>
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a Methodology for Developing Evidence-Informed Management Knowledge by Means of Systematic Review. *British Journal of Management*, 14(3), 207–222.
- Zulu, T., & Phiri, B. (2022). Analyzing Digital Education Policy in Southern Africa. *Southern African Journal of Education*. <https://doi.org/10.3332/saje.2022.0045>